



## **Meneguhkan Kerasulan Awam Katolik dalam Mewujudkan Demokrasi Bermartabat**

### *Affirming the Catholic Lay Apostolate in Realizing a Dignified Democracy*

**Rofinus Neto Wuli**

Program Studi Agroteknologi, Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa

Email Korespondensi: e-mail: [141167rnw@gmail.com](mailto:141167rnw@gmail.com)<sup>✉</sup>

#### **Histori Artikel**

Masuk: 24-03-2025 | Diterima: 27-04-2025 | Diterbitkan: 01-05-2025

#### **Abstrak**

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan partisipasi politik umat Katolik, khususnya awam, dalam menghadapi tantangan demokrasi kontemporer yang ditandai oleh maraknya politik uang dan politik identitas. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rekoleksi spiritualitas yang menasar umat awam Katolik di Kabupaten Ende sebagai bagian dari pendidikan politik dan refleksi iman di tengah dinamika pemilu 2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan *community-based education* yang menggabungkan narasi reflektif, diskusi partisipatif, dan penguatan nilai-nilai moral-politik berdasarkan ajaran sosial Gereja Katolik. Materi yang disampaikan mencakup analisis sistem pemilu, dampak destruktif *money politics*, serta penyalahgunaan sentimen identitas dalam politik elektoral. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran kritis peserta terhadap pentingnya berpolitik secara etis, serta perlunya membangun kesatuan iman dan aksi di tengah perbedaan pilihan politik. Peserta juga mulai memahami peran kerasulan politik sebagai bagian dari panggilan iman untuk memperjuangkan *bonum commune* dan menolak praktik politik transaksional maupun sektarian. Kesimpulannya, rekoleksi ini terbukti efektif sebagai ruang formasi politik umat yang menekankan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan tanggung jawab publik. Kegiatan semacam ini perlu diperluas secara sistematis agar umat Katolik semakin siap menjadi aktor transformasi sosial-politik yang bermartabat dan berakar pada nilai-nilai iman.

**Kata Kunci:** Kerasulan Awam Katolik; Demokrasi Bermartabat; Politik Uang dan Identitas; Pendidikan Politik Berbasis Iman

#### **Abstract**

This community service activity aims to strengthen the political understanding and participation of Catholics, particularly the laity, in facing the challenges of contemporary democracy, which are increasingly marked by money politics and identity politics. The program was carried out in the form of a spiritual recollection targeting Catholic laypeople in Ende Regency, serving as a space for political education and faith reflection amid the dynamics of the 2024 general election. The method used was a *community-based education* approach, combining reflective narratives, participatory discussions, and the reinforcement of moral-political values grounded in Catholic social teaching. The materials presented included analysis of the electoral system, the destructive impact of *money politics*, and the misuse of identity sentiments in electoral politics. The results of the activity showed an increase in participants' critical awareness of the importance of ethical political engagement and the need to foster unity of faith and action despite differing political preferences. Participants also began to understand the role of political apostolate as part of a faith-based calling to pursue the *bonum commune* and to reject transactional and sectarian political practices. In conclusion, this recollection proved effective as a formative space for political awareness among the faithful, emphasizing the values of justice, unity, and public responsibility. Such initiatives should be expanded systematically to prepare Catholics to become dignified social-political actors rooted in their faith values.

**Keywords:** Catholic Lay Apostolate; Dignified Democracy; Money and Identity Politics; Faith-Based Political Education

*This is an open access article under the CC BY-SA license*



## **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum di Indonesia bukan sekadar prosedur demokratis, tetapi merupakan ruang kontestasi yang menentukan arah kepemimpinan dan masa depan bangsa. Dalam idealitasnya, pemilu menjadi cerminan dari kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip etika politik yang luhur. Namun dalam kenyataan, praktik demokrasi elektoral di Indonesia masih tercemari oleh dua bentuk degradasi serius: politik uang (*money politics*) dan politik identitas (*identity politics*). Kedua praktik ini tidak hanya merusak integritas proses politik, tetapi juga mengancam kohesi sosial dan menurunkan kualitas moral publik.

Dalam konteks politik identitas, Suhariyanto (2024) mengungkap bahwa Pemilu Presiden 2019 menyisakan luka kolektif karena eksploitasi isu-isu agama yang tajam untuk memecah belah pemilih. Politik berbasis identitas agama, suku, atau golongan tidak lagi digunakan untuk menguatkan representasi kelompok, melainkan dimobilisasi secara manipulatif demi kepentingan elektoral jangka pendek. Hal serupa diamati dalam Pilgub Bali 2018, ketika kelompok minoritas seperti Muhammadiyah menghadapi tantangan representasi akibat intensitas politik identitas, namun berhasil dimitigasi melalui komunikasi politik yang berorientasi pada nilai-nilai kebajikan dan kepercayaan sosial (Suswanta & Setiawan, 2022; 2024).

Dinamika serupa terjadi di daerah seperti Kabupaten Ende, di mana kontestasi elektoral pasca-reformasi justru memperkuat pengorganisasian identitas sebagai strategi utama dalam meraih suara (Danugroho, 2024). Polarisasi berbasis suku dan agama menjadi kian mencolok, terutama menjelang Pemilu 2024, yang ditandai dengan semakin menguatnya narasi sektarian di ruang publik (Fauzan et al., 2023). Di tengah gejala ini, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memainkan peran penting dalam memediasi ketegangan dan membangun harmoni sosial lintas identitas (Ahmad et al., 2023), meskipun upaya ini masih terbatas dalam jangkauan dan daya transformasi sosialnya.

Dalam situasi seperti ini, umat Katolik tidak bisa tinggal diam. Spiritualitas awam Katolik menuntut keterlibatan aktif dalam kehidupan publik, tidak hanya sebagai warga negara, tetapi juga sebagai pribadi beriman yang dipanggil untuk menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan *bonum commune*. Rekker et al. (2017) menunjukkan bahwa identitas politik yang dibentuk sejak dini berpengaruh besar terhadap pilihan dan sikap politik seseorang. Ini berarti bahwa pendidikan politik etis berbasis iman menjadi krusial dalam membentuk kader awam Katolik yang tangguh dan visioner. Sebagaimana ditekankan oleh Martini (2012), agama memiliki daya pengaruh yang kuat dalam membentuk opini publik, dan karenanya memiliki potensi besar untuk membimbing arah politik menuju keadilan sosial.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, yang dilaksanakan dalam bentuk rekoleksi spiritualitas awam Katolik, diharapkan terjadi proses pemurnian motivasi politik dan penguatan kesadaran kolektif umat Katolik untuk terlibat secara kritis dan etis dalam kehidupan demokrasi. Pengabdian ini bertujuan untuk: (1) membekali umat Katolik dengan pemahaman kritis terhadap praktik *money politics* dan *identity politics*; (2) meneguhkan kerasulan awam dalam arena politik sebagai bentuk panggilan iman; dan (3) membangun kesadaran politik bermartabat demi terwujudnya demokrasi yang adil, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan serta iman Kristiani.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yaitu pendekatan kolaboratif yang menempatkan peserta kegiatan sebagai subjek aktif dalam proses identifikasi masalah, refleksi kritis, dan pencarian solusi. PAR dipilih karena pendekatan ini memungkinkan terjadinya transformasi kesadaran secara kolektif, terutama dalam membangun pemahaman etis terhadap demokrasi, serta meneguhkan peran kerasulan awam Katolik dalam menghadapi tantangan politik uang dan politik identitas.

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah umat Katolik di Kabupaten Ende, khususnya para kader awam Katolik dari berbagai kelompok umat basis (KUB), tokoh komunitas, dan anggota organisasi kategorial yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial dan keagamaan di tingkat lokal. Jumlah peserta kegiatan adalah 65 orang, yang dipilih berdasarkan rekomendasi Komisi Kerawam Keuskupan Agung Ende dan panitia lokal.

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk rekoleksi spiritual selama satu hari penuh (pukul 08.00–18.00 WITA) di Aula Bina Kerahiman, Kota Ende. Tahapan kegiatan dibagi dalam empat fase utama:

1. Pre-assessment dan penggalian ekspektasi peserta, dilakukan melalui angket terbuka dan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk mengetahui persepsi awal tentang politik uang dan politik identitas.
2. Pemberian materi inti oleh narasumber utama (RD. Dr. Rofinus Neto Wuli), mencakup kajian sistem pemilu, praktik politik transaksional dan sektarian, serta refleksi iman Katolik dalam kerasulan politik.
3. Refleksi dan diskusi partisipatif, difasilitasi dalam kelompok kecil, dengan panduan studi kasus dan permenungan teks Kitab Suci serta dokumen Gereja tentang keterlibatan awam dalam masyarakat.
4. Formulasi komitmen tindak lanjut, berupa penyusunan rencana aksi sederhana untuk diseminasi nilai-nilai demokrasi bermartabat di tingkat komunitas masing-masing.

Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, dokumentasi proses diskusi, dan kuisisioner evaluasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan tematik, untuk mengidentifikasi perubahan persepsi, intensi tindakan, dan potensi kaderisasi kerasulan awam dalam bidang politik.

Efektivitas program diukur melalui dua indikator utama: (1) peningkatan pemahaman kritis peserta terhadap bahaya *money politics* dan *identity politics*; dan (2) komitmen individu maupun kelompok untuk menjadi pelopor pemilu bermartabat di komunitas masing-masing. Pendekatan PAR dalam kegiatan ini tidak hanya memungkinkan terjadinya refleksi etis, tetapi juga menciptakan ruang transformatif di mana umat Katolik dapat meneguhkan peran mereka sebagai agen perubahan dalam kehidupan demokrasi bangsa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan rekoleksi spiritualitas kerasulan awam Katolik di Kevikepan Ende menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam membentuk kesadaran umat terhadap bahaya praktik politik uang dan politik identitas menjelang Pemilu 2024. Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 60 peserta ini tidak hanya menjadi forum reflektif, tetapi juga menjadi ruang dialog yang memadukan dimensi spiritualitas dan kesadaran sosial-politik. Antusiasme peserta terlihat sejak sesi awal kegiatan. Banyak peserta menyampaikan bahwa mereka sebelumnya belum memahami secara mendalam bahwa politik uang merupakan bentuk pelanggaran etika demokrasi dan iman Kristiani. Namun, setelah mendengarkan pemaparan mendalam dari RD. Dr. Rofinus Neto Wuli (Gambar 1), peserta mulai menyadari bahwa praktik semacam itu melemahkan martabat pemilih dan merusak nilai-nilai keadilan sosial.



Gambar 1. Narasumber Saat Menyampaikan Materi Utama tentang Peran Kerasulan Awam Katolik Menghadapi Politik Uang dan Politik Identitas

Pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi membaca peta politik nasional menuju Pemilu Serentak 2024 yang disampaikan oleh pemateri tamu (Gambar 2). Materi ini membongkar praktik-praktik politisasi identitas yang sering digunakan dalam kontestasi lokal, termasuk eksploitasi isu agama, suku, dan golongan. Para peserta, yang sebelumnya cenderung menganggap politik identitas sebagai hal lumrah, mulai melihat sisi gelap dari manipulasi emosional dan simbolik yang berujung pada polarisasi masyarakat. Diskusi kelompok pun berlangsung dinamis, di mana peserta saling berbagi pengalaman tentang bagaimana narasi sektarian telah memecah belah komunitas umat dalam pemilihan-pemilihan sebelumnya.



Gambar 2. Pemateri Tamu Memaparkan Peta Politik Nasional Menuju Pemilu Serentak 2024 dalam Sesi Reflektif dan Analitis

Menariknya, kegiatan ini tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi menghasilkan berbagai rumusan rencana tindak lanjut. Beberapa peserta menyampaikan komitmennya untuk menyuarakan pemilu damai melalui mimbar gereja, membentuk komunitas kerasulan demokrasi, dan melakukan edukasi politik berbasis nilai-nilai iman Katolik di lingkungan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan rekoleksi ini berhasil menggerakkan kesadaran kolektif menjadi aksi nyata. Dalam diskusi kelompok, peserta juga merefleksikan panggilan kerasulan mereka bukan sekadar sebagai warga negara pasif, tetapi sebagai agen moral yang bertugas menjaga integritas publik. Suasana ruang kegiatan yang dihiasi simbol-simbol spiritual dan nasionalis (Gambar 3) turut membangun nuansa yang menggerakkan batin, mengajak umat untuk bersatu dan terlibat aktif dalam kehidupan berbangsa.



Gambar 3. Suasana Ruang Rekoleksi yang Mendukung Semangat Persatuan dan Refleksi Spiritualitas Kebangsaan

Keterlibatan aktif peserta dalam seluruh sesi, baik dalam diskusi, refleksi, maupun liturgi, membuktikan bahwa pendekatan *service learning* berbasis spiritualitas iman memiliki potensi besar dalam membentuk karakter politik yang berintegritas. Hasil pengabdian ini sejalan dengan gagasan Rekker et al. (2017) mengenai pentingnya pembentukan identitas politik berbasis nilai sejak dini. Dalam konteks Katolik, kerasulan awam tidak hanya terbatas pada karya-karya sosial gerejawi, tetapi juga harus hadir dalam panggung-panggung publik, termasuk demokrasi elektoral. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa formasi iman dan pendidikan politik dapat berjalan beriringan dalam memperkuat demokrasi yang bermartabat.

## **PENUTUP**

Kegiatan rekoleksi spiritualitas kerasulan awam Katolik di Kevikepan Ende berhasil membangun kesadaran kolektif umat terhadap pentingnya peran aktif dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Kesadaran tersebut ditandai dengan transformasi sikap peserta dalam memahami dan menanggapi isu-isu politik uang dan politik identitas. Melalui pendekatan reflektif dan partisipatif berbasis iman, umat Katolik didorong untuk tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga agen moral yang membawa nilai-nilai Injil ke dalam ruang publik. Kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak cukup hanya dengan pendekatan politik formal, tetapi juga membutuhkan formasi spiritual yang mendalam. Spiritualitas awam yang hidup dan kontekstual menjadi fondasi untuk membangun keadaban politik dan menolak segala bentuk manipulasi elektoral. Keterlibatan aktif umat dalam sesi reflektif, diskusi kelompok, dan komitmen tindak lanjut menunjukkan bahwa pendekatan berbasis *service learning* dalam kerangka kerasulan awam memiliki efektivitas tinggi dalam pembentukan karakter politik yang berintegritas. Sebagai tindak lanjut, disarankan agar kegiatan serupa dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas cakupannya hingga ke tingkat paroki dan lingkungan basis. Selain itu, perlu dikembangkan modul edukatif dan bahan formasi politik Katolik yang dapat digunakan sebagai pedoman pembinaan umat menjelang Pemilu 2024 dan seterusnya. Dengan demikian, gereja dapat berkontribusi lebih konkret dalam membentuk warga negara yang bukan hanya taat konstitusi, tetapi juga setia pada suara nurani dan iman yang hidup.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, J., Wafi, M., Mushkalamzai, Z., & Hadi, A. (2023). Multiculturalism and identity politics: reading on the religious harmony forum. *Ibda Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 21(2). <https://doi.org/10.24090/ibda.v21i2.7885>
- Danugroho, A. (2024). Defects of democracy: the continuity of identity politics in post-reform regional elections. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 19(1), 89-101. <https://doi.org/10.20473/jsd.v19i1.2024.89-101>
- Fauzan, I., Arifin, A., Dalimunthe, M., & Rahmadani, S. (2023). The configuration of ethnic and religious relations towards the 2024 general election: a case study in medan, indonesia. *Multidisciplinary Science Journal*, 6(2), 2024006. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2024006>
- Martini, N. (2012). "la iglesia" in politics? religion and latino public opinion\*. *Social Science Quarterly*, 93(4), 988-1006. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6237.2012.00867.x>
- Rekker, R., Keijsers, L., Branje, S., & Meeus, W. (2017). The dynamics of political identity and issue attitudes in adolescence and early adulthood. *Electoral Studies*, 46, 101-111. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.02.005>

Suhariyanto, D. (2024). Identity politics violations in Indonesian elections. *Devotion Journal of Research and Community Service*, 5(5), 558-563. <https://doi.org/10.59188/devotion.v5i5.720>

Suswanta, S. and Setiawan, A. (2022). Political preferences of Muhammadiyah residents as minority Muslims in the 2018 Bali governor election., 892-900. [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7\\_70](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7_70)

Suswanta, S. and Setiawan, A. (2024). Political choices of Muhammadiyah citizens as a Muslim minority in the 2018 Bali governor election in Indonesia. *Revista De Gestão Social E Ambiental*, 18(2), e06906. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n2-141>